

Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Jawa Tengah Ditinjau Dari Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Opini Audit BPK

Alfina Al Marsa Putri¹, Winarsih²

Universitas Islam Sultan Agung Semarang -¹alfinaalmarsa@gmail.com

-²winarsih@unissula.ac.id

Abstrak— This research aims to analyze and determine the influence of local own-source revenue on financial performance, to analyze and determine the influence of capital expenditure on financial performance, to analyze and determine the influence of balancing funds on financial performance, and to analyze and determine the audit opinion on financial performance. The population used in this study is the Regional Government Financial Statements for the 2020-2023 fiscal years. The total sample used in this study is 140 samples using the census sampling method. The data was processed using IMB SPSS 26 software. The analytical tool used in this research is multiple linear regression. According to the research findings, local own-source revenue has an influence on financial performance, capital expenditure does not have an influence on financial performance, balancing funds do not have an influence on financial performance, and the audit opinion does not have an influence on financial performance.

Keywords: Local Own-Source Revenue, Capital Expenditure, Balancing Funds, Audit Opinion, Financial Performance.

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah sistem yang dikenal memberikan kepada daerah kewenangan dan keleluasaan untuk mengelola dan mengurus pemerintahannya sendiri. UU No. 23 Tahun 2014 menetapkan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan demokrasi, pelayanan publik, efektivitas dan efisiensi pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah harus efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan adil, karena merupakan komponen penting dari penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Karena tidak dapat mengawasi perkembangan setiap wilayah secara menyeluruh, pemerintah pusat menetapkan kebijakan otonomi sejalan dengan anggaran daerah, peningkatan proses pembangunan ekonomi setelah penerapan kebijakan otonomi, dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien (Ardelia et al., 2022).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap daerah dapat menunjukkan pengelolaan keuangan mereka. APBD ini dapat digunakan untuk membuat peraturan pembangunan daerah untuk pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan kunci keberhasilan dan kesuksesan pembangunan. Setiap daerah di Indonesia harus melakukan pengelolaan keuangan, yang merupakan komponen yang sangat penting. Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dicapai dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan optimal, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Pembangunan daerah sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan mereka, pemerintah daerah diharapkan memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Meskipun pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik, desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pelaksanaan desentralisasi.

Kinerja keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah penerimaan daerah yang berasal dari wilayahnya sendiri dan dipungut sesuai dengan undang-undang yang berlaku (B. I. Sari & Halmawati, 2021). Kinerja keuangan sangat dipengaruhi oleh PAD. PAD memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap APBD jika pemerintah daerah tidak bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Secara umum, Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin bersemangat untuk menemukan sumber pendapatan baru dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi. Dengan jumlah PAD

Halaman 921

yang sangat terbatas, PAD seharusnya merupakan sumber pendapatan utama yang berkontribusi terhadap kinerja keuangan daerah. Namun, untuk membiayai berbagai kegiatan yang meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan dana yang besar, dan pemerintah daerah membutuhkan dana tambahan di luar PAD. Salah satu sumber dana tersebut adalah dana yang berasal dari bantuan pemerintah pusat (Zukhri, 2020). Namun, perlu dicatat bahwa PAD di Jawa Tengah sangat bervariasi antara kabupaten dan kota. Beberapa daerah masih dianggap sebagai daerah otonomi khusus (DOK) dengan tingkat rasio keuangan yang rendah. Penelitian yang dilakukan oleh (Ardelia et al., 2022) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang berbeda oleh (Azhar, 2021) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 2 Tahun 2011, belanja modal adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pembentukan modal dan dianggap sebagai penambahan aset tetap atau inventaris yang tersedia selama lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dilakukan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan kepada masyarakat, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2020, belanja modal sedikit tertahan dari 92,02% menjadi 89,91% karena aktivitas konstruksi dan pembangunan infrastruktur yang terbatas untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Namun, pada tahun 2021, anggaran belanja modal tumbuh sebesar 52,27%, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pemulihhan ekonomi pada tahun 2021 setelah anggaran pada komponen belanja ini mengalami kerugian pada tahun sebelumnya.

Pemerintah daerah harus memaksimalkan anggaran belanjanya dan meningkatkan kinerjanya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, dan masyarakat yang sejahtera akan menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerahnya baik. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk belanja modal. Diharapkan belanja modal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Ramadana & Bahgia, 2023) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh (Amin Insani et al., 2023) menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2020	-2,65
2021	3,33
2022	5,31
2023	5,23

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2020 adalah tahun di mana COVID-19 mulai menyebar dan mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Kondisi ini menjadi salah satu bukti bahwa pandemi COVID-19 memberi dampak lebih besar pada ekonomi Jawa Tengah dan Nasional dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Namun, perekonomian Jawa Tengah meningkat sebesar 3,32% selama tiga bulan pertama tahun 2021, jauh lebih baik dari 2,65% di tahun 2020. Kemudian tahun 2022 perekonomian meningkat lebih besar menjadi 5,31% menunjukkan tren positif yang berlanjut. Memasuki tahun 2023, pada triwulan II, pertumbuhan tercatat sebesar 5,23%, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya tetapi masih lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang

mencapai 5,17%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah harus dievaluasi. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi telah menurun, yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak optimal, yang menghasilkan hasil yang tidak memuaskan. Manajemen keuangan daerah harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah juga dipengaruhi oleh dana perimbangan. Penghasilan daerah yang berasal dari APBN, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dikenal sebagai dana perimbangan. Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, DAU adalah dana yang diperoleh dari pendapatan APBN dan dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah yang digunakan untuk pelaksanaan. Dana Alokasi Khusus (DAK) memengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang memadai untuk kepentingan umum. DAK meningkatkan kinerja keuangan. Jika DAK diberikan kepada Pemerintah Daerah semakin besar, pembiayaan urusan daerah akan menjadi lebih baik. Ini akan menghasilkan manifestasi keuangan yang lebih baik karena dana yang diawasi oleh Pemerintah Daerah akan semakin besar. Penelitian yang dilakukan oleh (Ariska, 2022) menunjukkan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Namun, penelitian berbeda yang dilakukan oleh (Ardelia et al., 2022) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan.

Opini audit merupakan pernyataan profesional dari BPK tentang kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit juga didasarkan pada kriteria seperti kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kecukupan pengungkapan. Opini audit juga merupakan hasil dari tinjauan informasi LKPD yang lengkap atau telah diperiksa secara menyeluruh (Rasyid et al., 2022). Opini audit dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas entitas pemerintah. Opini audit membantu pemakai laporan keuangan menilai keberlangsungan hidup bisnis, resiko investasi, dan kewajaran kegiatan operasi. Jika informasi diberikan secara akurat, tanpa keraguan, dan secara menyeluruh, maka informasi tersebut dapat dianggap wajar.

Dalam rangka menjamin kinerja keuangannya, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang kemudian diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK akan menghasilkan opini audit dan temuan audit. Opini audit dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas entitas serta akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Pemberian opini WTP oleh BPK menjadi parameter bahwa suatu pemerintahan menunjukkan performa keuangan yang baik dan mematuhi regulasi yang berlaku.

Dengan memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) pemerintah daerah Jawa Tengah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kinerja keuangan. Namun demikian, masih ada beberapa masalah yang menghalangi pencapaian opini WTP BPK secara konsisten. Ini termasuk sistem pengendalian internal yang buruk, kurangnya kemampuan sumber daya manusia di bidang akuntansi dan keuangan, dan kurangnya koordinasi antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Penelitian yang dilakukan oleh (Az Zahrah et al., 2024) menunjukkan bahwa Opini audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Studi yang berbeda oleh (Wijayanti & Suryandari, 2020) dimana hasil penelitiannya memperlihatkan opini audit BPK memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah proses evaluasi sistematis tentang seberapa efektif dan efisien pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan menggunakan indikator keuangan yang relevan dan dapat diukur. Terdapat indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rasio Belanja Modal terhadap APBD, Rasio Sisa Anggaran Belanja Modal (Siskeb) terhadap Belanja Modal, Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK, Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Tingkat kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang meliputi faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena segala hal yang berkaitan dengan keuangan dinilai sensitif untuk dikaji lebih dalam. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang diteliti (Endri & Dini, 2020) yang meneliti mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti menambahkan variabel dana perimbangan seperti yang diteliti oleh (Digdowiseiso et al., 2022) untuk

menguji dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan perbedaan lain adalah penelitian ini berfokus pada kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah periode anggaran 2020-2023. Berdasarkan data laju pertumbuhan ekonomi yang masih berfluktuasi menunjukkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah masih perlu banyak dievaluasi karena sesuai data yang ada terkadang mengalami penurunan yang dimana hal ini menjadi salah satu tolak ukur kurang optimalnya pengelolaan keuangan yang menciptakan kinerja keuangan yang kurang memuaskan.

Konsep yang dibahas dalam penelitian ini didasarkan pada teori keagenan, juga dikenal sebagai teori agensi. Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemberi kuasa (*principal*) dan orang yang diberi kuasa (*agent*) yang bekerja sama untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Teori ini berasumsi bahwa setiap orang dimotivasi oleh kepentingannya sendiri, sehingga dapat terjadi konflik kepentingan. Dalam teori ini, agensi bertindak sebagai manajemen, dan prinsipal bertindak sebagai pemilik (Harianto & Aini, 2021). Dalam konteks kinerja pemerintah menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai agent dan masyarakat sebagai *principal*. Dalam hubungan ini, masyarakat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya dan memberikan pelayanan publik.

Teori ini menekankan pentingnya akuntabilitas, di mana pemerintah harus mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan keputusan yang diambil kepada masyarakat yang diwakili oleh legislatif sebagai agen, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Namun, sering kali terdapat asimetri informasi, di mana agen memiliki akses lebih besar terhadap informasi dibandingkan dengan prinsipal. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak transparan dan akuntabel.

Dalam penelitian ini, dari sisi masyarakat (*principal*) merasa kurang puas dengan hasil yang dicapai oleh pemerintah daerah (*agent*). Dari sisi pemerintah daerah (*agent*) kurang memperhatikan kepentingan masyarakat umum (*principal*) melainkan mementingkan kesejahteraannya sendiri. Bentuk dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya yaitu melaporakan kinerjanya melalui laporan keuangan setiap periodenya sebagai pengungkapan informasi kepada publik untuk mengurangi *agency cost*.

Relevansi antara teori keagenan dengan kinerja keuangan dapat dilihat dari adanya peran pengelolaan keuangan pemerintah daerahnya. Dalam mengelola keuangan daerahnya, pemerintah daerah hendak memiliki sumber-sumber keuangan melalui pendapatan asli daerah dan belanja modal serta memperhatikan dana perimbangan dalam menilai kinerja keuangan. Bentuk dari tanggungjawab pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya yaitu melaporakan performanya dengan laporan keuangan tiap periodenya. Kemudian diaudit oleh BPK untuk menilai kewajaran laporan keuangannya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian eksplanasi (*explanatory research*) dimana digunakan untuk menguji suatu hubungan antar variabel atau mengetahui apakah suatu variabel berhubungan atau tidak dengan variabel lainnya, atau untuk mengetahui apakah suatu variabel disebabkan atau dipengaruhi atau tidak oleh variabel lainnya. Dengan menggunakan metode sensus sampling, sampel pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan pada 35 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah dan Laporan Hasil Pemeriksaan Provinsi Jawa Tengah. Data diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik dan website resmi BPK Perwakilan Jawa Tengah.

Tahapan dalam analisis data mencakup uji asumsi klasik, seperti uji normalitas, multikolinearitas, uji autokorelasi dan heteroskedastisitas, sebelum menerapkan analisis regresi linier berganda pada data. Untuk menentukan sejauh mana setiap variabel independen memengaruhi variabel dependen yang dianggap konstan, digunakan uji t. Di sisi lain, uji F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen yang sedang diuji. Alat atau software yang digunakan dalam penelitian adalah software SPSS Versi 26.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi residual data pada regresi linear berdistribusi normal. Dalam model regresi linear, asumsi ini diwakili oleh nilai eror yang berdistribusi normal. Model regresi ini dianggap baik apabila memiliki distribusi normal atau hampir normal, dan sehingga pantas untuk diuji secara statistik. *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* digunakan dalam penelitian ini. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, data dianggap normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, data dianggap tidak normal. Berikut hasil uji normalitas *kolmogrov-smirnov*:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual			
N			140
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		4,07585629
Most Differences	Extreme	Absolute	,040
		Positive	,029
		Negative	-,040
Test Statistic			,040
Asymp. Sig. (2-tailed)			,200 ^{c,d}

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 26, 2025

Dari tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0.200 yang artinya lebih besar dari 0,05 dan menunjukkan bahwa distribusi residual data normal.

2) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi residual periode pengamatan dengan pengamatan sebelumnya melalui deteksi Durbin Watson. Kriteria uji Durbin Watson (DW) menetapkan bahwa apabila angka DW berada di antara du dan 4-dU, maka dinyatakan bebas autokorelasi. Tabel 3 menunjukkan keputusan apakah ada atau tidaknya autokorelasi.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi
Durbin Watson

No	Durbin-Watson	Keterangan
1	1,823	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 26, 2025

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh hasil Durbin-Watson test sebesar 1,823. Dimana $1,823 > 1,7830$ (dU), serta $1,823 < 2,217$ (4-dU). Sehingga, nilai DW sudah sesuai dengan ketentuan yakni nilai DW lebih besar daripada dU dan nilai DW lebih kecil daripada 4-dU, atau sudah sesuai dengan konsep $dU < DW < 4-dU$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat atau bebas autokorelasi.

3) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat hasil pengolahan data pada tolerance value lebih dari 0,1 atau nilai VIF kurang dari 10. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel independen atau apakah setiap variabel independen menjelaskan variabel independen lainnya. Hasil uji multikolinearitas berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics			Keterangan	
	Tolerance	VIF			
1	Pendapatan Asli Daerah	,151	6,620	Tidak	Terjadi Multikolinearitas
	Belanja Modal	,161	6,224	Tidak	Terjadi Multikolinearitas
	Dana Perimbangan	,796	1,257	Tidak	Terjadi Multikolinearitas
	Opini Audit	,999	1,001	Tidak	Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 26, 2025

Hasil uji multikolinearitas untuk variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa nilai toleransi sebesar 0,151 atau lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF sebesar 6,620 atau lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Hasil uji multikolinearitas untuk variabel Belanja Modal menunjukkan bahwa nilai toleransi sebesar 0,161 atau lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF sebesar 6,224 atau lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Hasil uji multikolinearitas untuk variabel Dana Perimbangan menunjukkan bahwa nilai toleransi sebesar 0,796 atau lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,257 atau lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Hasil uji multikolinearitas untuk variabel Opini Audit menunjukkan bahwa nilai toleransi sebesar 0,999 atau lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,001 atau lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

4) Uji Heteroskedastisitas

Tujuan pengujian heteroskedastisitas adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan varians residual dibandingkan dengan observasi dalam model regresi. Pada penelitian ini, nilai heteroskedastisitas diperiksa melalui uji Glejser. Apabila nilai Sig lebih besar dari 0,05, data tidak menunjukkan heteroskedastisitas, namun apabila nilai Sig kurang dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji Glejser yang digunakan dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji Glejser**

No.	Variabel	Sig.	Keterangan
1.	Pendapatan Asli Daerah	,785	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
2.	Belanja Modal	,607	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
3.	Dana Perimbangan	,125	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
4.	Opini Audit	,178	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 26, 2025

Hasil uji heteroskedastisitas untuk variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,785, yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas untuk variabel Belanja Modal menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,607, yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas untuk variabel Dana Perimbangan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,125, yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas untuk variabel Opini Audit menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,178, yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menilai empat variabel, yaitu Kinerja Keuangan sebagai variabel dependen dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal (BM), Dana Perimbangan (DP), dan Opini Audit (OA) sebagai variabel independen. Hasil dari regresi linear berganda disajikan pada tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	Sig.
1 (Constant)	124,249	1,677		
2 Pendapatan Asli Daerah	3,957E-9	,000	1,051	,000
3 Belanja Modal	-1,148E-9	,000	-,461	,000
4 Dana Perimbangan	-3,298E-10	,000	-,258	,000
5 Opini Audit	-4,847	,415	-,582	,000

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 26, 2025

Berdasarkan tabel diatas didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 124,249 + 3,957E-9 X_1 - 1,148E-9 X_2 - 3,298E-10 X_3 - 4,847 X_4 + e$$

Dari persamaan regresi linear berganda diatas, dapat diinterpretasikan yaitu:

- Nilai konstanta (constant) menunjukkan angka 124,249 dengan arah positif yang memiliki arti apabila variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Belanja Modal (X2), Dana Perimbangan (X3) Dan Opini Audit (X4) dianggap konstan, maka besarnya variabel Kinerja Keuangan (Y) adalah sebesar 124,249.
- Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka 3,957E-9 dengan arah positif yang artinya setiap peningkatan variabel Pendapatan Asli Daerah sebanyak 1 satuan berarti akan meningkatkan variabel Kinerja Keuangan sebanyak 3,957E-9 serta beranggapan variabel lain dalam bentuk konstan.
- Koefisien regresi variabel Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka 1,148E-9 dengan arah negatif yang Artinya setiap peningkatan variabel Belanja Modal sebanyak 1 satuan berarti akan menurunkan variabel Kinerja Keuangan sebanyak 1,148E-9 serta beranggapan variabel lain dalam bentuk konstan.
- Koefisien regresi variabel Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka 3,298E-10 dengan arah negatif yang Artinya setiap peningkatan variabel Dana Perimbangan sebanyak 1 satuan berarti akan menurunkan variabel Kinerja Keuangan sebanyak 3,298E-10 serta beranggapan variabel lain dalam bentuk konstan.
- Koefisien regresi variabel Opini Audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka 4,847 dengan arah negatif yang memiliki arti setiap peningkatan opini audit sebesar 1 satuan maka akan menurunkan kinerja pemerintah daerah sebesar 4,847 serta beranggapan variabel lain dalam bentuk konstan.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi atau R Square (R²) adalah ukuran yang mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1, dan hasil regresi dikatakan lebih baik jika nilai R² meningkat atau mendekati 1. Ini menunjukkan bahwa variabel independen memberikan sebagian besar informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen. Tabel 7 berikut menunjukkan hasil uji koefisien determinasi.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,815 ^a	0,664	0,655	0,414

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 26, 2025

Berdasarkan hasil dari uji koefisien determinasi, nilai adjusted R square (Adjusted R²) menunjukkan sebesar 0,655. Hal ini berarti 65,5% kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, belanja modal, dana perimbangan, dan opini audit. Sedangkan, sisanya 34,5% (100%-65,5%) kinerja keuangan dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengujian Hipotesis

Tolak ukur pada uji t dapat dilihat melalui arah koefisien regresi dan nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji t

Model	Coefficients			
	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	
		Std. Error	Beta	Sig.
1 (Constant)	124,249	1,677		
2 Pendapatan Asli Daerah	3,957E-9	,000	1,051	,000
3 Belanja Modal	-1,148E-9	,000	-,461	,000
4 Dana Perimbangan	-3,298E-10	,000	-,258	,000
5 Opini Audit	-4,847	,415	-,582	,000

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 26, 2025

Berdasarkan Tabel 8 di atas, hasil pengujian dengan uji parsial (uji t) untuk setiap variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Kinerja Keuangan (Y)

Berdasarkan pengujian di atas, didapatkan hasil estimasi variabel PAD memiliki koefisien regresi sebesar 3,957E-9 dengan arah positif dan nilai signifikansi 0,000, di bawah 0,05 menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. H_1 menyatakan PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan olah data menunjukkan bahwa hipotesis diterima.

b. Pengaruh Belanja Modal (X_2) terhadap Kinerja Keuangan (Y)

Berdasarkan pengujian di atas, didapatkan hasil estimasi variabel Belanja Modal memiliki koefisien regresi sebesar 1,148E-9 dengan arah negatif dan nilai signifikansi 0,000, di bawah 0,05 menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. H_2 menyatakan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan olah data menunjukkan bahwa hipotesis ditolak.

c. Pengaruh Dana Perimbangan (X_3) terhadap Kinerja Keuangan (Y)

Berdasarkan pengujian di atas, didapatkan hasil estimasi variabel Dana Perimbangan memiliki koefisien regresi sebesar 3,298E-10 dengan arah negatif dan nilai signifikansi 0,000, di bawah 0,05 menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. H_3 menyatakan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan olah data menunjukkan bahwa hipotesis ditolak.

d. Pengaruh Opini Audit (X_4) terhadap Kinerja Keuangan (Y)

Berdasarkan pengujian di atas, didapatkan hasil estimasi variabel Opini Audit memiliki koefisien regresi sebesar 4,847 dengan arah negatif dan nilai signifikansi 0,000, di bawah 0,05 menunjukkan bahwa variabel Opini Audit memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. H_4 menyatakan Opini Audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan olah data menunjukkan bahwa hipotesis ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan sendiri. Semakin besar PAD,

semakin mandiri dan efisien daerah dalam mengelola keuangannya tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Peningkatan PAD akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah karena pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah menekankan bahwa PAD berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah, seperti pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya.

Dalam teori agensi, hubungan antara pemerintah daerah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal* menuntut akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu indikator penting untuk menilai kinerja pemerintah sebagai *agent* adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini karena menunjukkan seberapa baik pemerintah dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal secara mandiri tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Peningkatan PAD di Jawa Tengah seharusnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam teori agensi, keberhasilan agen tidak hanya diukur dari seberapa baik mereka meningkatkan PAD, tetapi juga dari seberapa baik mereka mengelola PAD dengan cara yang efisien dan menguntungkan masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh H. M. Sari et al., (2021), PAD memengaruhi kinerja keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan semakin banyak PAD yang diperoleh, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan pembangunan dan meningkatkan potensi kekayaan daerahnya yang akan menghasilkan peningkatan PAD.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel Belanja Modal terbukti tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Belanja modal seringkali tidak diiringi dengan efisiensi dan efektivitas penggunaan. Belanja modal dimaksudkan untuk investasi jangka panjang seperti infrastruktur dan fasilitas publik, tetapi dampaknya terhadap kinerja keuangan tidak langsung terasa dalam jangka pendek. Selain itu, ada beberapa masalah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan belanja modal, seperti keterlambatan proyek, pemborosan anggaran, dan output yang buruk. Akibatnya, belanja modal yang tinggi tidak selalu menunjukkan kinerja keuangan yang baik, terutama dalam hal infrastruktur.

Berdasarkan teori agensi, pemerintah daerah bertindak sebagai *agent* yang diberi mandat oleh masyarakat (*principal*) untuk mengelola keuangan publik secara efektif, termasuk dalam pengalokasian belanja modal. Belanja modal seharusnya berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena belanja modal merupakan investasi jangka panjang yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, fasilitas umum, dan layanan publik. Pengeluaran ini seharusnya mampu meningkatkan produktivitas daerah, memperkuat ekonomi lokal, dan pada akhirnya menghasilkan peningkatan pendapatan daerah yang berkelanjutan, serta efisiensi pengeluaran pemerintah. Dalam kerangka teori agensi, hal ini merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah sebagai agen dalam mengelola sumber daya publik demi kepentingan masyarakat sebagai *principal*. Teori agensi pada umumnya menyatakan bahwa jika Belanja Modal meningkat maka akan diikuti peningkatan Kinerja Keuangan. Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa tingginya Belanja Modal yang dikeluarkan akan menurunkan Kinerja Keuangan. Namun, Belanja modal seringkali tidak direncanakan secara optimal, menyebabkan proyek yang didanai tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, indikator kinerja keuangan daerah biasanya diukur dalam jangka pendek, seperti tahunan, sehingga dampaknya belum terlihat secara langsung selama periode pengamatan. Akibatnya, tingkat efisiensi pelaksanaan proyek belanja modal masih rendah, ditandai dengan keterlambatan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Diggowiseiso et al., (2022) yang menyatakan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Namun, sejalan dengan hasil penelitian Amin Insani et al., (2023) dan Maulina et al., (2021) yang menyatakan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana perimbangan terbukti tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena daerah cenderung pasif, penggunaannya terbatas oleh aturan pusat, dan sering difokuskan pada belanja rutin, bukan pembangunan strategis yang bisa meningkatkan efisiensi atau kemandirian fiskal. Hal ini disebabkan karena banyak pemerintah daerah terlalu bergantung pada dana perimbangan, sehingga kurang terdorong untuk mengelola keuangan secara mandiri dan optimal. Selain itu, sebagian besar dana ini sudah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat, sehingga daerah tidak memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal.

Berdasarkan teori agensi, pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang diberi mandat oleh masyarakat (*principal*) untuk mengelola dana publik secara transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Dana perimbangan, yang diberikan oleh pemerintah pusat, seharusnya menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja keuangan secara keseluruhan. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan yang seharusnya menjadi instrumen fiskal untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya dana transfer dari pemerintah pusat tidak secara otomatis mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketergantungan terhadap dana perimbangan tanpa diimbangi dengan penguatan kapasitas fiskal dan efisiensi penggunaan anggaran justru berpotensi menciptakan kelemahan struktural dalam kinerja keuangan, di mana pemerintah daerah cenderung pasif dan kurang terdorong untuk menggali potensi pendapatan asli secara optimal.

Penelitian ini tidak sejalan dengan Maulina et al., (2021) yang menyatakan semakin tinggi dana perimbangan diikuti dengan peningkatan Kinerja Keuangan. Namun, sejalan dengan penelitian oleh Fernandes & Hilwani, (2021) dan Diggowiseiso et al., (2022). Banyaknya bantuan Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat yang berdampak pada turunnya tingkat kemandirian suatu daerah.

Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Audit terbukti tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Opini audit tahun sebelumnya (T-1) sangat penting untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, termasuk di Jawa Tengah. Hasil penilaian BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah untuk tahun sebelumnya menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Laporan keuangan disusun dengan baik dan dapat dipercaya, menurut opini audit yang baik seperti Wajar Tanpa Pengecualian. Opini audit ini memiliki efek yang signifikan dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah, mempermudah mendapatkan pembiayaan, dan memberikan umpan balik yang bermanfaat tentang pengelolaan anggaran. Hasil audit dapat menyebabkan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas. Dengan mempertimbangkan hasil audit dan menerapkan rekomendasi yang diberikan, pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kinerja keuangan.

Berdasarkan teori agensi, Opini Audit merupakan salah satu bentuk mekanisme pengawasan eksternal yang bertujuan untuk memastikan bahwa agen (pemerintah daerah) menjalankan tugas pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel kepada *principal* (masyarakat). Secara teori, opini audit yang baik seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seharusnya menjadi indikator bahwa agen telah bertindak sesuai kepentingan *principal*, dan pada akhirnya mendorong peningkatan kinerja keuangan. Namun, hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Meskipun opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan alat penting untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, ada situasi di mana opini audit tahun sebelumnya tidak selalu mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah di tahun berikutnya. Pandemi COVID-19 adalah salah satu kondisi tersebut. Sejak awal tahun 2020, pandemi telah memengaruhi kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran di banyak tempat. Redistribusi anggaran, pengaturan belanja, dan penyesuaian prioritas program untuk penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, banyak target kinerja keuangan gagal dicapai sesuai rencana karena faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan bukan tata kelola keuangan yang buruk. Menurut hasil statistik deskriptif, nilai rata-rata variabel opini audit cenderung seragam. Ini karena sebagian besar entitas sampel penelitian menerima opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Homogenitas opini audit tersebut menyebabkan perilaku data menjadi agak stabil dan tidak secara signifikan menunjukkan perbedaan performa antar entitas. Oleh karena itu, opini audit WTP tidak cukup untuk membedakan kinerja yang diukur, yang tercermin dari rata-rata data yang hampir sama.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Suandani et al., (2021) yang menyatakan semakin baik Opini Audit yang diterima pemerintah daerah maka akan diikuti peningkatan Kinerja Keuangan. Namun, penelitian ini sejalan dengan Endri & Dini, (2020) dan Amin Insani et al., (2023) yang menyatakan meningkat atau menurunnya opini audit yang diberikan oleh BPK belum tentu membuat kinerja pemerintah daerahnya baik melainkan menurun karena masih tedapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah dan juga BPK sebagai auditor pemerintah lebih menekankan pada kewajaran laporan keuangan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan sendiri. Semakin besar PAD, semakin mandiri dan efisien daerah dalam mengelola keuangannya tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.
2. Belanja modal tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Data menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam belanja modal, kinerja keuangan tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja keuangan. Belanja modal seringkali tidak diiringi dengan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja modal tidak optimal sehingga tidak mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan.
3. Dana Perimbangan tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Ketergantungan terhadap dana perimbangan tanpa diimbangi dengan penguatan kapasitas fiskal dan efisiensi penggunaan anggaran justru berpotensi menciptakan kelemahan struktural dalam kinerja keuangan. Meskipun terdapat alokasi dana perimbangan yang signifikan, data menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah tidak mengalami peningkatan yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana tersebut tidak efektif dalam meningkatkan kinerja.
4. Opini Audit tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi kondisi keuangan secara luas, serta perilaku data yang menunjukkan kecenderungan rata-rata entitas memperoleh opini WTP, sehingga tidak memberikan variasi yang cukup untuk memengaruhi atau membedakan kinerja secara statistik.

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka saran atau rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan agar pemerintah daerah lebih inovatif dalam menggali sumber-sumber PAD, terutama yang berasal dari sektor ekonomi lokal potensial, seperti pariwisata, UMKM, dan pajak daerah yang belum tergarap optimal.
2. Perlu adanya evaluasi berkala terhadap belanja modal agar lebih tepat sasaran dan mampu memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Dana perimbangan sebaiknya digunakan untuk memperkuat sektor-sektor yang kurang berkembang di daerah, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan publik.
4. Tingkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan agar pemerintah daerah tetap memperoleh WTP dari BPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Insani, Rahayu, S., & Misni Erwati. (2023). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 109–125. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.343>
- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 60–80. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165>
- Ariska, R. Y. (2022). *Dampak Penghasilan Asli Daerah , Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. 2, 1–11.
- Az Zahrah, F., Zaen, M. R., & Mellinia, S. P. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 2(1), 369–384.
- Azhar, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(02), 164–174. <https://doi.org/10.56196/jta.v11i02.190>

- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.* 4(6), 2572–2580. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1150>
- Endri, L., & Dini, H. W. (2020). *Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.* 7(2), 1–8.
- Fernandes, J., & Hilwani, A. N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2019-2021. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastics,* 4(2), 266–282. <https://doi.org/10.58192/profit.v2i2.750>
- Harianto, R., & Aini, N. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen terhadap Biaya Utang. *Liability,* 03(1), 55–76. <https://journal.uwks.ac.id/index.php/liability>
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.* *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.,* 5(2), 523–531. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2>
- Ramadana, S. W., & Bahgia, S. (2023). *Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.* 7(April), 1831–1840.
- Rasyid, Y., Suci, R. G., & Putri, A. M. (2022). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi),* 10(2), 80–93. <https://doi.org/10.24127/pro.v10i2.6589>
- Sari, B. I., & Halmawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Mapping the Posthuman,* 3(1), 56–60. <https://doi.org/10.4324/9781003322603-5>
- Sari, H. M., Afriyanti, & Edisa, H. (2021). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KERINCI.* *Jurnal Administrasi Nusantara Maha,* 3(12), 109–125.
- Suandani, P., Putu, I. G., & Astawa, B. (2021). *Pengaruh Opini Audit , Belanja Modal , Pendapatan Asli Daerah , Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali Tahun 2015-2019.* 728–739.
- Wijayanti, Y., & Suryandari, D. (2020). The Effect of Regional Characteristics, Leverage, Government Complexity, BPK Audit Findings and Opinions on Local Government Financial Performance. *Accounting Analysis Journal,* 9(1), 30–37. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v9i1.22483>
- Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik,* 5(2), 143–149. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213>